

## **BAB 2**

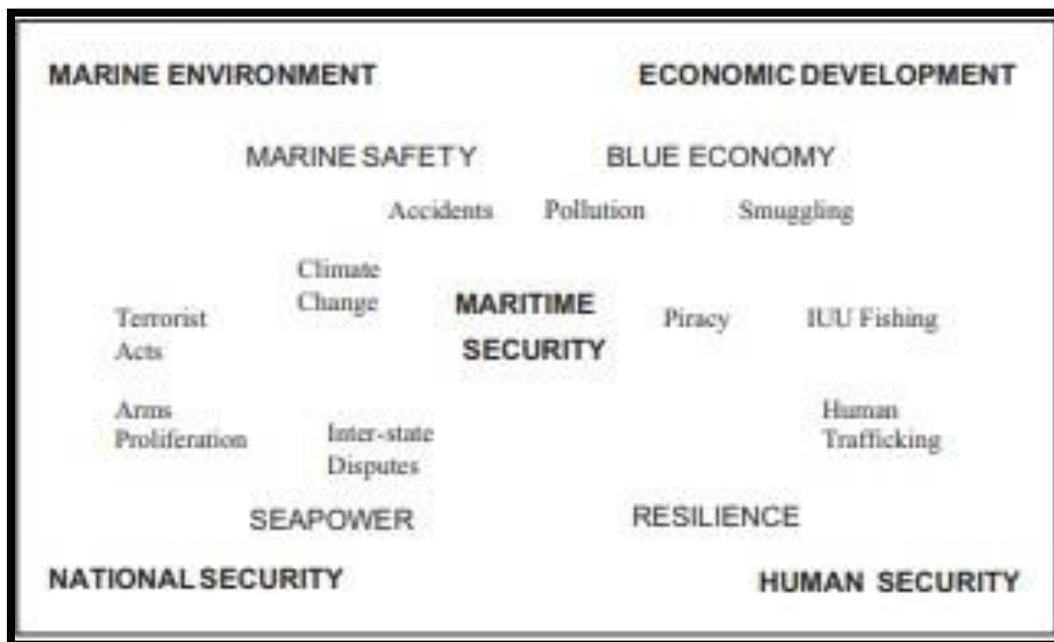
### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Penelitian ini mengadopsi landasan teori keamanan maritim yang terkait dengan permasalahan penelitian sebagai kerangka dasar. Teori tersebut secara rinci dijelaskan dalam bagian tinjauan pustaka penelitian.

##### **2.1.1. Teori Keamanan Maritim**

Menurut Buerger (2015) konsep matriks keamanan maritim, keamanan maritim dianalogikan dalam pemikiran semiotik, makna istilah dapat dipahami dengan memeriksa hubungan istilah dengan sesuatu yang lain. Keamanan maritim mengelola jaringan hubungan dengan mengganti atau mengelompokkan konsep lama yang sudah mapan dan menggabungkannya dengan perkembangan yang lebih baru menjadi satu kesatuan. Setidaknya dalam konsep keamanan maritim terdapat empat dimensi atau matriks di antaranya adalah: Konsep kekuatan laut (*sea power*), keselamatan laut (*marine safety*), *blue economy*, dan ketahanan manusia (*human resilience*) memiliki dimensi yang beragam dalam konteks keamanan maritim. Konsep kekuatan laut dan keselamatan laut membahas metode dan pemahaman mengenai yang berusia satu abad tentang bahaya di laut, dan yang memberikan dampak secara bersamaan dengan keamanan maritim. Terdapat beberapa implementasi dari konsep matriks keamanan laut (*maritime security matrix*) terhadap kekuatan laut Indonesia (Indonesia *sea power*). Adapun lebih kompleksnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 Matriks Keamanan Maritim.



**Gambar 2.1. Matriks Keamanan Maritim**

Sumber: Buerger (2015).

Ancaman keamanan maritim juga digunakan dalam debat geopolitik sebagai argumen (antara lain) untuk memproyeksikan keamanan di luar batas eksternal. Dengan kata lain, representasi geografis yang dibingkai oleh dikotomi aman/internal dan tidak aman/eksternal mengandung unsur maritim. Mengamankan kebebasan laut dan memantau komunitas "*Global Commons*" membenarkan aturan, norma, tetapi juga kekuatan polisi dan angkatan laut yang mencerminkan batas teritorial atau hukum. Dengan kata lain, keamanan maritim memiliki dimensi geopolitik. Kendali jarak jauh atas wilayah maritim disajikan bila diperlukan untuk memastikan keamanan di darat (Germond, 2015).

Setiawan (2017) menyampaikan bahwa keamanan maritim menarik perhatian besar dari berbagai macam negara yang ada di dunia, terutama negara-negara adikuasa. Setiap negara membuat pedoman untuk keselamatan maritim. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai major power, keamanan maritim memegang peranan penting dalam hubungan internasional di tingkat regional dan global. Di negara-negara tersebut, perumusan konsep keamanan maritim berpedoman pada kepentingan

keamanan politik, ekonomi, bahkan sosial budaya.

Marsetio (2016) menyatakan bahwa jika berbicara tentang konsep dasar suatu negara, maka tidak lepas dari gagasan Ketahanan nasional merupakan upaya untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keberlanjutan negara secara menyeluruh. Konsep ketahanan nasional dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu Trigatra dan Pancagrata. Trigatra terdiri dari pertahanan keamanan, pertahanan ideologi, dan pertahanan ekonomi. Pertahanan keamanan melibatkan upaya menjaga keamanan negara dari ancaman militer maupun non-militer. Pertahanan ideologi berfokus pada upaya mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Sementara itu, pertahanan ekonomi berkaitan dengan upaya membangun dan menjaga kestabilan ekonomi nasional. Sedangkan, Pancagrata melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan negara, baik dalam aspek keamanan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan menjalankan konsep Trigatra dan Pancagrata, diharapkan ketahanan nasional dapat terjaga dengan baik demi keberlanjutan dan kemajuan negara.

Konsep keamanan maritim Indonesia tidak terlepas dari kepentingan nasional Indonesia, salah satunya membawa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Istilah poros maritim dunia semakin populer saat ini dan menarik perhatian banyak kalangan, termasuk media arus utama yang akhir-akhir ini juga sering menampilkan istilah tersebut dalam pemberitaannya. Istilah itu seolah tak lepas dari pemikiran dan usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Poros Maritim Dunia adalah sebuah konsep yang diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi maritim Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya peran laut dalam pembangunan dan hubungan internasional. Dalam konsep ini, Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros atau pusat kegiatan maritim di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Dengan konsep Poros Maritim Dunia

ini, Jokowi berharap Indonesia dapat memanfaatkan potensi kelautan sebagai sumber daya ekonomi yang berkelanjutan serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Pengembangan sektor kelautan melalui pengembangan lima pilar yakni :

- a. **Budaya Maritim**, Budaya maritim mengacu pada warisan budaya yang terkait dengan identitas Indonesia dengan potensi kehidupan dan aktivitas di sekitar perairan.
- b. **Ekonomi Maritim**, Ekonomi maritim melibatkan segala aktivitas ekonomi yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya dan potensi ekonomi yang berasal dari laut dan perairan.
- c. **Konektivitas Maritim**, Konektivitas maritim mencakup segala upaya untuk memperkuat dan memperluas hubungan dan keterhubungan antara negara-negara melalui jalur laut dan perairan.
- d. **Diplomasi Maritim**, Diplomasi maritim melibatkan upaya diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara untuk mempromosikan kerjasama dan mengatasi permasalahan yang terkait dengan wilayah maritim.
- e. **Keamanan Maritim**, Keamanan maritim mencakup segala upaya untuk melindungi dan menjaga keamanan perairan, jalur pelayaran, dan aktivitas di wilayah maritim dari ancaman dan gangguan.

Perikanan tangkap memiliki hubungan yang erat dengan keamanan maritim. Kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan di perairan laut mempengaruhi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan politik di wilayah maritim. Keberlanjutan perikanan tangkap yang baik dapat berkontribusi pada stabilitas keamanan maritim, sementara ketidakberlanjutan perikanan tangkap dapat memicu konflik dan ketegangan di antara negara-negara yang memiliki klaim terhadap sumber daya perikanan (Nainggolan, 2015).

Aspek yang menjadi fokus utama salah satunya adalah hubungan perikanan tangkap dengan keamanan maritim adalah isu sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Jika sumber daya ikan dieksploitasi secara

berlebihan atau tidak terkendali, hal ini dapat mengancam keberlanjutan perikanan dan menyebabkan konflik antara nelayan, pada kanca nasional maupun mancanegara. Oleh karena itu, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan maritim.

Selain itu, perikanan tangkap juga dapat berdampak pada keamanan pangan. Sebagian besar negara yang memiliki wilayah pesisir bergantung pada perikanan sebagai sumber utama protein hewani. Jika perikanan tangkap tidak dilakukan dengan baik, dapat terjadi penurunan produksi ikan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kelangkaan pangan, kerentanan pangan, dan meningkatkan risiko kelaparan. Kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas politik di wilayah maritim (Ulfa, 2018).

Perikanan tangkap juga dapat terkait dengan keamanan maritim dalam hal penegakan hukum dan perlindungan terhadap kegiatan ilegal, seperti penangkapan ikan secara ilegal, pengeboman ikan, atau pencurian sumber daya perikanan. Keberadaan kegiatan ilegal semacam itu dapat merusak ekosistem laut, merugikan nelayan yang beroperasi secara legal, dan mengancam stabilitas keamanan maritim. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan kerjasama antar negara dalam melawan kegiatan ilegal di sektor perikanan menjadi sangat penting (Suwarno, *et. al.*, 2021).

Dalam rangka menjaga keamanan maritim, kerjasama regional dan internasional dalam pengelolaan perikanan tangkap juga menjadi kunci. Melalui kerjasama yang baik, negara-negara dapat saling berbagi informasi, melakukan patroli bersama, dan mengadopsi kebijakan yang seragam untuk mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hubungan antara perikanan tangkap dengan keamanan maritim harus dijaga dengan baik agar dapat mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial, dan politik di wilayah maritim (Suwarno, *et. al.*, 2021).

Berikut adalah beberapa hubungan antara ketahanan maritim dan infrastruktur perikanan (Nainggolan, 2015):

- a. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan: Sarana dan prasarana perikanan yang memadai, seperti pelabuhan modern dan

fasilitas pemrosesan ikan yang efisien, dapat mendukung upaya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Pengelolaan yang baik akan mencegah eksploitasi berlebihan dan membantu dalam menjaga keberlanjutan stok ikan di wilayah perairan.

- b. Peningkatan Akses ke Perairan: Sarana dan prasarana perikanan yang baik, seperti dermaga dan pelabuhan yang mudah diakses, memungkinkan nelayan untuk mencapai area perikanan yang strategis dengan lebih efisien. Ini dapat membantu mengoptimalkan hasil tangkapan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan potensi ekonomi perikanan.
- c. Keselamatan dan Keamanan Nelayan: Fasilitas keamanan, seperti pos penjagaan, sistem pemantauan, dan bengkel perbaikan kapal yang memadai, merupakan bagian penting dari infrastruktur perikanan. Hal ini dapat meningkatkan keselamatan nelayan di laut dan membantu mengurangi risiko kecelakaan dan bencana maritim.
- d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tangkapan: Infrastruktur pemrosesan ikan yang canggih dan efisien membantu

- e. nelayan untuk memproses hasil tangkapan dengan cepat dan mempertahankan kualitas ikan. Selain itu, fasilitas pemasaran dan distribusi yang baik juga mendukung kemampuan nelayan untuk mengakses pasar lokal maupun ekspor, sehingga meningkatkan pendapatan mereka

- f. Penyelidikan dan Pemantauan Sumber Daya Laut: Infrastruktur perikanan juga termasuk dukungan teknologi dan laboratorium untuk kegiatan riset dan pemantauan sumber daya laut. Data dan informasi yang terkumpul akan menjadi dasar penting untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

### **2.1.2. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah menjadi langkah signifikan dalam memperkuat struktur pemerintahan di Indonesia. Melalui transfer kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, otonomi daerah bertujuan untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada entitas daerah dalam mengelola dan mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya. Wewenang ini mencakup sejumlah sektor, termasuk pemerintahan, keuangan, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Prinsip otonomi daerah diharapkan mampu tercipta pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih relevan dan berdampak positif bagi kemajuan daerah tersebut (Maisyanah, 2018).

Namun dalam perspektif M. Turner dan D. Hulme (1997), pelaksanaan otonomi daerah juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola wewenang yang diberikan. Diperlukan kapasitas yang memadai, meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan keuangan. Selain itu, koordinasi efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dianggap sebagai faktor kunci untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Diperlukan kerjasama yang harmonis dan sinergis untuk mencegah tumpang tindih atau konflik kepentingan antar daerah. Pengawasan dan evaluasi yang cermat juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa wewenang yang diberikan tidak disalahgunakan dan kebijakan yang diimplementasikan tetap sejalan

dengan tujuan pembangunan nasional. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, diharapkan implementasi otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif pada pembangunan di tingkat daerah.

Wewenang Daerah Provinsi di laut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mencakup kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang berada di wilayahnya. Kewenangan ini melibatkan:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.
- b. Pengaturan administratif.
- c. Pengaturan tata ruang.
- d. Berpartisipasi dalam menjaga keamanan di laut.
- e. Berpartisipasi dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah regulasi yang mengatur tata kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah. Di dalamnya, terdapat ketentuan terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta panduan untuk mengelola pemerintahan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan dalam pengelolaan laut yang semula dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam jarak 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Kewenangan pengelolaan laut diberikan kepada pemerintah provinsi. Perbedaan peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Romawi I huruf Y.

**Tabel 2.1. Matrik Pembagian Urusan Bidang Kelautan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

No.	Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/kota
1	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional.</li> <li>b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional.</li> <li>c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara.</li> <li>d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.</li> <li>e. Penetapan kawasan konservasi.</li> <li>f. Database pesisir dan pulau-pulau kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.</li> <li>b. Penerbitan izin dan</li> <li>c. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.</li> <li>d. Penerbitan izin dan</li> </ul>	
2	Perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil.</li> <li>b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).</li> <li>c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kapal perikanan berukuran di atas 30 gross Tonase (GT); dan</li> <li>2) Di bawah 20 gross tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.</li> </ul> </li> <li>d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional.</li> <li>e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.</li> <li>f. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30GT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.</li> <li>b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</li> <li>c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.</li> <li>d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</li> <li>e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</li> </ul>
3	Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan.</li> <li>b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia.</li> <li>c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing</li> </ul>	Penerbitan IUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</li> <li>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan</li> </ul>
4	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	

### **2.1.3. Good Governance**

Good governance adalah konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Konsep ini mencakup transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipasi, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Good governance menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berintegritas, serta mengedepankan pengelolaan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, diharapkan tercipta pemerintahan yang efektif, adil, dan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Istilah ini sekarang lebih digunakan juga dalam arti yang lebih luas. Hal ini karena lembaga eksekutif sering dianggap bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan program pemerintah serta melaksanakannya. Namun, administrasi publik terutama berfokus pada "perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian operasi pemerintah. Pemahaman Frederick C. Mosher (1978), menyimpulkan bahwa administrasi publik secara luas bertugas menentukan kebijakan publik dan melaksanakan kebijakan publik melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan operasional pemerintahan, dapat Anda lampirkan. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan mulai dari pemerintah hingga masyarakat memerlukan suatu organisasi yang mempunyai kewenangan untuk mengendalikan administrasi publik. Organisasi ini disebut birokrasi.

Menurut Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP), Tata kelola pemerintah yang baik merujuk pada prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang menjaga integritas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini melibatkan pemenuhan aturan hukum, pengelolaan keuangan yang efisien, keterbukaan informasi, pemantauan dan evaluasi

yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tata kelola pemerintah yang baik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, mengurangi korupsi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan menerapkan tata kelola pemerintah yang baik, diharapkan tercipta pemerintahan yang responsif, adil, dan dapat memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat (Widowati *et. al.*, 2019).

Prinsip tata pemerintah yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Transparansi mengharuskan pemerintah untuk terbuka dan jujur dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Akuntabilitas mewajibkan pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan yang diambil. Sementara itu, partisipasi melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Prinsip partisipasi yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004, mengacu pada ketentuan Pasal 60 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberdayaan nelayan kecil dan budidaya ikan skala kecil dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dalam sektor perikanan dapat diwujudkan melalui upaya pemberdayaan. Sebagai contoh, pemerintah provinsi Sumatera Selatan berusaha mengutamakan potensi perikanan di wilayahnya dengan memberdayakan masyarakat pesisir. Melalui program ini, kelompok masyarakat nelayan skala kecil dari berbagai daerah akan mendapatkan peningkatan kapasitas di berbagai bidang seperti pengelolaan ekosistem dan keterlibatan sosial, yang tidak hanya akan memberdayakan nelayan skala kecil tetapi juga memberikan pendidikan kelautan (Sabarisman, 2017).

Kebijakan perikanan harus dikembangkan dengan partisipasi para pemangku kepentingan, termasuk komunitas nelayan itu sendiri, karena kepentingan kelangsungan hidup mereka dipertaruhkan. Politisi harus

bertanggung jawab. Akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diimplementasikan Pemerintah memiliki peran yang penting dalam kegiatan pengelolaan perikanan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan. Pemerintah bertanggung jawab dalam mengembangkan kebijakan, peraturan, dan strategi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, termasuk penetapan kuota penangkapan, zona penangkapan, dan perlindungan terhadap habitat laut. Selain itu, pemerintah juga bertugas dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, melaksanakan penegakan hukum terkait perikanan, serta memastikan bahwa nelayan dan pelaku usaha perikanan mematuhi aturan yang berlaku. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada nelayan, seperti dalam hal pengembangan teknologi, pelatihan, dan akses pasar, guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Melalui peran aktifnya, pemerintah berupaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, melindungi lingkungan laut, dan memastikan bahwa sektor perikanan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan ekonomi negara (Widowati *et. al.*, 2019).

Pasal 48 dan 49 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 memberikan ketentuan bahwa semua individu (kecuali nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil) yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya perairan dan lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia, termasuk warga negara asing yang berada dalam wilayah pengelolaan perikanan tersebut. Jika seseorang terdaftar dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), izin penangkapan ikan dapat diperoleh, dan pajak penangkapan ikan akan tunduk pada regulasi hukum. Sesuai dengan Pasal 76A Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, pungutan tersebut akan dialokasikan untuk mendukung kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan perikanan dan konservasi sumber daya perikanan dan lingkungan hidup.

#### **2.1.4. Teori Strategi**

Strategi merupakan proses untuk menentukan visi dan misi perusahaan dengan melibatkan faktor internal dan eksternal guna menetapkan tujuan organisasi. Selain itu, strategi juga melibatkan perumusan Kebijakan dan strategi khusus dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, dan upaya dilakukan untuk memastikan penerapan kebijakan dan strategi tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Implementasi strategi ini bertujuan untuk mencapai target dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Strategi, pada dasarnya, merupakan pendekatan komprehensif yang melibatkan formulasi ide, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Untuk mencapai hasil yang optimal, penting untuk memastikan bahwa strategi tersebut, diperlukan koordinasi antara kelompok kerja. Inti dari strategi adalah mengidentifikasi faktor pendukung berdasarkan prinsip, menerapkan ide yang rasional, memastikan efektivitas pembiayaan, serta menggunakan taktik pencapaian tujuan yang efektif (Fandi, 2000).

Menurut Alfred Chandler (2009), strategi mencakup penetapan tujuan dan arah tindakan, serta alokasi sumber daya yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut. Pendapat Kenneth Andrew menyatakan bahwa strategi adalah suatu pola yang melibatkan tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang merupakan bagian dari rencana besar untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi ini mencakup perusahaan dan jenis atau organisasi di mana strategi diterapkan. Strategi dapat dianggap sebagai rencana menyeluruh untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks bisnis, strategi tidak hanya berfokus pada Proses sosial dan manajerial merupakan mekanisme yang memungkinkan individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui proses penciptaan produk dan nilai, serta distribusinya kepada pihak lain.

Teori strategis mendorong kita untuk mempertimbangkan semua potensi dan kekuatan yang ada, serta memperhatikan biaya dan risiko dari keputusan yang diambil serta dampaknya terhadap musuh, sekutu, dan

pihak lain (Yarger, 2006). Dalam teori strategi terdapat elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan penting untuk dirumuskan yaitu *Ends*, *Means*, dan *Ways* :

1. *Ends*, yang menjelaskan apa yang telah dicapai. Mempertimbangkan manfaat lingkungan dan faktor strategis yang mempengaruhi kinerja yang diinginkan.
2. *Means*, yaitu sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sumber daya merupakan faktor penting dalam mendukung tujuan, sumber daya yang lemah membuat pencapaian tujuan menjadi sulit. Sebaliknya, sumber daya yang kuat memudahkan pencapaian tujuan.
3. *Ways*, yaitu bagaimana cara mencapai tujuan yang dapat dicapai. Dalam hal ini, cara mengkombinasikan sumber daya yang ada dengan aktor untuk mencapai tujuan tersebut.

#### **2.1.4.1. Tipe-tipe Strategi**

Setiap organisasi merancang strategi yang unik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki. Ragam jenis strategi diterapkan dalam berbagai organisasi. Dalam konteks organisasi dan lembaga pemerintah, beragam strategi dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagaimana diungkapkan oleh Kooten sebagaimana yang dikutip dalam tulisan Salusu, strategi-strategi ini menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan organisasi dan lembaga tersebut, ada beberapa jenis strategi sebagai berikut:

- a. Strategi Organisasi (*Strategy Organization*) merujuk pada pengembangan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif strategis baru. Batasan ini diperlukan untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan dan untuk siapa agar tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Strategi Program lebih menekankan pada dampak strategis dari suatu program tertentu. Contohnya, penting untuk memahami konsekuensi yang mungkin timbul jika suatu

program dimulai atau dijalankan (bagaimana dampaknya terhadap tujuan perusahaan) agar menghindari potensi kemunduran yang tidak diinginkan.

- c. Strategi Dukungan Sumber Daya (*Resource Support Strategy*) berfokus pada optimalisasi sumber daya inti seperti manusia, keuangan, teknologi, dan lainnya untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
- d. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*) menitikberatkan pada pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif strategis. Dalam konteks penelitian ini, strategi terprogram menjadi pilihan, karena strategi program memberikan prioritas pada dampak dari kegiatan yang diperkenalkan dan dilaksanakan. Strategi program juga mempertimbangkan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.

#### **2.1.4.2. Tahap-tahap Strategi**

Menurut (Bambang Hariadi, 2005), menjelaskan adanya 2 tahap-tahap strategi, yaitu:

##### **a. Perumusan**

- 1) Langkah pertama aktor termasuk analisis lingkungan internal dan eksternal adalah menentukan visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategis.
- 2) Perencanaan strategis adalah proses mempersiapkan langkah masa depan untuk menetapkan visi dan misi, tujuan strategis, dan menetapkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut guna memberikan nilai terbaik kepada pelanggan.
- 3) Jelaskan konteks lingkungan yang akan dihadapi oleh pemimpin. Pemimpin diharapkan mampu merumuskan tujuan yang dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam lingkungan tersebut.
- 4) Melakukan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal

untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang perlu diatasi.

- 5) Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
- 6) Pada tahap strategis, pemimpin atau pengambil keputusan memulai dengan merumuskan visi dan merencanakan langkah-langkah ke depan berdasarkan lingkungan yang telah dipilih, serta menentukan tindakan yang perlu dilaksanakan atau diimplementasikan saat ini untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Pelaksanaan

- 1) Setelah tahap perencanaan strategis selesai, langkah berikutnya sangatlah penting.
- 2) Strategi bisnis adalah tentang penerapan strategi.
- 3) Implementasi strategi adalah proses penerapan strategi dan kebijakan dengan menetapkan struktur atau kerangka kerja, pengembangan program, anggaran, dan proses implementasi.

Pelaksanaan strategi merupakan fase yang rumit dalam proses strategis karena terdapat banyak variabel yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tersebut dan mungkin tidak selalu sesuai dengan prediksi awal. Kesuksesan strategi memerlukan dukungan dari organisasi yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan kompeten, alokasi sumber daya yang memadai, kebijakan yang sesuai, budaya yang mendukung, serta kondisi-kondisi yang mendukung implementasi yang efektif dan situasi yang memungkinkan implementasi strategi berhasil.

Menurut Hatten dan Hatten (1998) Salusu menjelaskan pedoman strategi yang sukses:

- a. Strategi perlu selaras dengan lingkungan. Dalam konteks ini, penentuan strategi harus sejalan dengan evolusi perusahaan pada saat ini.
- b. Sebuah organisasi tidak seharusnya mengadopsi hanya satu strategi, namun bergantung pada cakupan kegiatan yang dilakukannya.

- c. Strategi yang efektif adalah yang memusatkan perhatian dan mengintegrasikan semua sumber daya, tanpa memisahkan elemen-elemen tersebut.
- d. Suatu strategi perlu memperhitungkan kekuatannya, bukan hanya fokus pada kelemahannya saja.
- e. Aku. Sumber daya adalah kuncinya.
- f. Penetapan strategi harus memperhitungkan risiko sekecil apapun agar tidak menjadi ancaman bagi organisasi di kemudian hari.
- g. Gram Rencana tersebut harus disusun berdasarkan keberhasilan yang dicapai.
- h. Tanda-tanda keberhasilan strategi terlihat pada dukungan pihak-pihak terkait terutama pimpinan puncak, seluruh pimpinan bidang fungsional organisasi atau instansi.

#### **2.1.4.3. Konsep Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Strategi pemerintah menjadi faktor penting dalam pertimbangan untuk memajukan pembangunan bagi kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Daerah sebagai pemegang wewenang di daerah, yang lebih dikenal oleh masyarakatnya sendiri dan juga adalah organisasi pemerintahan Wilayah yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan daerah yang diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibatasi oleh parameter tertentu.

Pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir Dilihat sebagai langkah untuk mempercepat proses pembangunan melalui penyediaan fasilitas fisik dan non-fisik, serta penguatan masyarakat membangun masyarakat yang efektif dan tangguh. Pembangunan bersifat multidimensi dan perlu dikaitkan dengan wilayah, sektor, dan dimensi sumber daya alam untuk memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan nasional (Makagingge *et al.*, 2017).

Keberadaan daerah pesisir, khususnya desa nelayan, berada dalam situasi di mana pengembangan mata pencaharian tidak dapat dilihat. Masyarakat pesisir terpaksa menghadapi kenyataan kehidupan sosial yang membuat mereka terjebak dalam kemiskinan. Mereka merasakan tekanan hidup sehari-hari yang menghantui mereka. Itulah sebabnya, saat ini ada dorongan untuk melibatkan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (Makagingge *et al.*, 2017).

Pemberdayaan komunitas pesisir merupakan strategi yang dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai langkah dan program hasil laut. Hal ini akan melibatkan berbagai kegiatan, termasuk memperkuat keterlibatan dan keswadayaan masyarakat, memperbaiki lingkungan, mengembangkan usaha masyarakat pesisir, mengembangkan lembaga keuangan masyarakat pesisir, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan produksi. Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir harus dapat melakukan peningkatan terhadap kemampuan individu dan mengubah perilaku masyarakat agar dapat mencapai standar hidup yang lebih baik dipandang sebagai suatu hal yang penting. Pemberdayaan dianggap sebagai kunci untuk membangun struktur ekonomi yang seimbang, maju, dan adil, serta untuk memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan. Menggalakkan inisiatif masyarakat yang tangguh dan berdiri sendiri. Meningkatkan kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan lokal, meratakan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi tingkat kemiskinan juga menjadi tujuan utama (Kusnadi, 2002).

Dalam pembicaraan mengenai pembangunan sosial, strategi pemberdayaan selalu berhubungan dengan strategi otonomi, Partisipasi, jaringan, dan keadilan merupakan elemen-elemen kunci dalam konsep pemberdayaan. Secara esensial, pemberdayaan merujuk pada penguatan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Menurut Hikmat (2006), pemberdayaan melibatkan pemahaman psikologis terhadap pengaruh kondisi sosial, kekuasaan politik, dan kontrol pribadi terhadap

hak-hak hukum individu. Di sisi lain, menurut Suharto (2005), pemberdayaan mencakup kemampuan masyarakat, khususnya kelompok yang lemah dan rentan, untuk (a) memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mencapai kebebasan, tidak hanya kebebasan berbicara, tetapi juga kebebasan dari kelaparan, kebodohan, dan penderitaan, (b) memiliki akses ke sumber daya produktif yang memungkinkan mereka mendapatkan pendapatan lebih besar dan barang serta jasa yang mereka butuhkan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi jalannya pembangunan (Suharto, 2005).

Pemberdayaan memiliki dua dimensi, yaitu sebagai Sebagai suatu proses, pemberdayaan melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan kelompok yang rentan di dalam masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi kondisi kemiskinan. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada kondisi dan hasil yang dicapai melalui perubahan sosial. Tujuan tersebut mencakup dimensi kekuatan, kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosial mereka, termasuk meningkatkan harga diri. aktualisasi diri, penghidupan, dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat, serta kemampuan untuk mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas hidup mereka sendiri. Menurut Ife (1995), pemberdayaan memiliki dua makna utama, yaitu adanya kelompok Kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah mengacu pada perbedaan tingkat keberdayaan di dalam masyarakat. Kekuasaan dalam konteks ini tidak hanya mencakup dominasi politik dalam pengertian yang terbatas, melainkan juga dominasi dan kontrol atas konsumsi, preferensi personal, serta peluang hidup, termasuk kapasitas untuk mengambil keputusan terkait gaya hidup, tempat tinggal, dan pekerjaan.

- a. Mengidentifikasi kebutuhan dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan aspirasi dan keinginan.
- b. Kebebasan dan kapasitas untuk menyampaikan serta berkontribusi dengan ide dalam forum atau diskusi tanpa adanya

tekanan.

- c. Akses, penggunaan, dan pengaruh terhadap lembaga-lembaga sosial seperti organisasi, institusi pendidikan, dan institusi kesehatan.
- d. Pemanfaatan sumber daya; Kemampuan untuk memobilisasi sumber daya formal, informal, dan komunitas.
- e. Keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, kemampuan untuk menggunakan serta menguasai alat produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa.
- f. Keterampilan yang terkait dengan proses reproduksi, seperti kelahiran, pengasuhan anak, pola asuh, dan tujuan dalam masyarakat (Ife, 1995).

Sebagai suatu proses, pemberdayaan melibatkan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat dan memberdayakan kelompok yang kurang berdaya dalam masyarakat, termasuk individu yang menghadapi tantangan kemiskinan. Sebaliknya, sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada kondisi dan hasil yang diinginkan melalui perubahan sosial. Artinya, individu memiliki kemandirian, keberdayaan, dan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Hal ini melibatkan rasa percaya diri, kemampuan mandiri dalam menyelesaikan tugas, termasuk kemampuan untuk mengungkapkan keinginan, mencari sumber penghasilan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Mendefinisikan pemberdayaan sebagai tujuan seringkali dianggap sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai suatu proses.

Dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti mengacu pada teori yang diajukan oleh Suhendra, yang menyebutkan adanya *metode partisipatori assessment* (MPA) yang terdiri dari empat tahap. (Suhendra, 2006) :

- a. Identifikasi masalahnya
  - 1) Permasalahan individu, kelompok dan masyarakat yang

dihadapi

- 2) Klasifikasi jaminan sosial pasca penerapan desentralisasi
- b. Temukan dan pahami potensi diri Anda
    - 1) Prasarana dan Ketersediaan Prasarana
    - 2) Terdapat pelayanan yang baik dari pemerintah, sektor swasta dan
    - 3) LSM dalam proses pemberdayaan.
  - c. Identifikasi masalah dan kemungkinannya
    - 1) Temukan akar penyebab masalah delegasi
    - 2) Menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pemberdayaan.
  - d. Memberikan solusi pemecahan masalah
    - 1) Memberikan pelatihan
    - 2) Hibah Program Koperasi
    - 3) Memberikan pelatihan
    - 4) Memberikan kendal

## **2.2. Hasil Penelitian Terdahulu**

Peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan terhadap fokus judul yang berkaitan dengan Strategi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Upaya Meningkatkan Hasil perikanan tangkap di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Ramla D. S dan Ruslan T (2017) dengan judul "Strategi Pengembangan Usaha Penangkapan Tuna Skala Kecil Di Kabupaten Seram Bagian Barat" mengadopsi metode analisis deskriptif untuk memberikan penjelasan yang rinci. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi keuntungan dalam usaha penangkapan ikan tuna skala kecil di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat ditingkatkan melalui penerapan strategi

kemitraan dan penggunaan pola bagi hasil yang optimal. Untuk mewujudkan strategi kemitraan, perlu dilakukan dengan profesionalisme, didukung oleh perjanjian yang jelas dan mematuhi prinsip-prinsip proporsionalitas, keadilan, keuntungan bersama, dan keberlanjutan. Selain itu, pola bagi hasil juga harus memperhitungkan kebutuhan kedua belah pihak agar dapat memberikan manfaat yang seimbang.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Zamdial et. al (2021) berjudul "Kajian Ekonomi Pembangunan Industri Perikanan Tuna Loin Di Kabupaten Kaur Provinsi Sumatera Selatan" menerapkan metode analisis deskriptif untuk memberikan penjelasan rinci. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa nilai kriteria investasi untuk industri perikanan tuna loin di Desa Pasar Lama, Kabupaten Kaur, Provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan Net B/C ratio sebesar 1,13, NPV sejumlah 594.414.281, IRR sebesar 16,20, dan PP sekitar 2,9. Data ini mengindikasikan bahwa pembangunan industri perikanan tuna di Desa Pasar Lama, Kabupaten Kaur, Provinsi Sumatera Selatan, dapat dianggap layak berdasarkan hasil analisis keuangan.
- c. Penelitian yang dilaksanakan oleh Nur, F (2016) dengan judul "Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Perikanan Di Desa Pulau Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara" menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan penjelasan mendalam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam mengembangkan potensi perikanan di Desa Pulau Harapan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, berhasil memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Keberhasilan ini tercermin dalam panen ikan yang dilakukan satu atau dua kali setahun. Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam pencapaian ini.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Sierfi Rahayu (2017) berjudul "Strategi Dinas Perikanan Dalam Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak" menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan penjelasan rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi perikanan tangkap di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, belum mencapai tingkat optimal. Strategi yang diusulkan untuk meningkatkan efektivitas melibatkan kerjasama erat dengan pemerintah dan nelayan, optimalisasi kolaborasi dengan investor dan lembaga perbankan, pembuatan peraturan yang jelas untuk nelayan baru dan industri, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk melibatkan nelayan.
- e. Penelitian yang dilakukan oleh Salawaty, D., et al. (2020) dengan judul "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mempertahankan Sumber Daya Perikanan Tangkap Di Sungai Rungan Kota Palangka" menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap di Kota Palangka telah terbukti berhasil. Beberapa langkah yang diimplementasikan melibatkan kebijakan penebaran benih ikan (restocking) di sungai dan danau di Kota Palangka Raya, pengendalian illegal fishing dengan regulasi alat tangkap ikan, pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Ikan perairan Kota Palangka Raya, dan memberikan sanksi berupa pembinaan kepada masyarakat nelayan yang terlibat dalam kegiatan illegal fishing. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pengembangan konservasi dan rehabilitasi kawasan perikanan di sungai dan danau di Kota Palangka Raya. Saat ini, sungai mengalami penurunan kualitas air karena dampak limbah perkebunan, kegiatan illegal fishing dengan racun, tuba, dan alat setrum, serta aktivitas tambang emas dan

pasir yang ilegal. Meskipun tingkat konsumsi masyarakat terhadap ikan terus meningkat, produksi perikanan tangkap di Kota Palangka Raya mengalami penurunan setiap tahunnya karena degradasi lingkungan di sungai dan danau.

- f. Penelitian yang dilakukan oleh R, A., Norromodani (2017) dengan judul "SWOT Analysis Potensi dan Strategi Pengembangan Bisnis pada Cluster Sektor Perikanan Laut Kabupaten/Kota di Jawa Timur" menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Cluster A (Banyuwangi, Lamongan, Sumenep) perlu menggagas strategi bisnis W-T (memanfaatkan kelemahan untuk menghindari ancaman). Cluster B (Gresik, Pamekasan, Mojokerto) memerlukan pengembangan strategi bisnis W-O (menggunakan kelemahan untuk meraih peluang). Cluster C (Pacitan, Trenggalek, Malang, Jember, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Sampang) perlu merumuskan strategi bisnis S-O (mengoptimalkan kekuatan untuk mengejar peluang). Cluster D (Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Kediri, Lumajang, Bondowoso, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, dan Batu) disarankan untuk menyusun strategi bisnis S-T (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman).
- g. Penelitian yang dilakukan oleh Dai, L., et al. (2019) berjudul "Factors Influencing Successful Fishing of Tuna Free-Swimming Schools in the Equatorial Western Pacific Ocean," bertujuan untuk menentukan faktor mana yang memiliki dampak signifikan terhadap hasil penangkapan ikan tuna menggunakan data yang dikumpulkan oleh pengamat di Samudera Pasifik bagian barat khatulistiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penangkapan sangat dipengaruhi oleh rata-rata kecepatan tenggelamnya alat tangkap, kondisi siang hari, dan kecepatan arus di lapisan dalam. Kecepatan

tenggelum yang cepat dapat mengurangi peluang ikan melarikan diri di bawah jaring yang tenggelam, sehingga meningkatkan rasio keberhasilan. Tingkat keberhasilan lebih tinggi pada periode intensitas cahaya rendah, seperti senja. Kecepatan tenggelam jaring dipengaruhi oleh kecepatan arus di lapisan dalam, yang berkorelasi dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Faktor-faktor ini dan pengaruh relatifnya telah diidentifikasi, memberikan panduan bagi nelayan untuk lebih efektif mengarahkan usaha mereka dari rangkaian yang terkait ke rangkaian yang tidak terkait, serta berkontribusi pada pemanfaatan yang berkelanjutan dan konservasi stok tuna di Samudera Pasifik barat khatulistiwa.

- h. Penelitian yang dilakukan oleh Lukman et al. (2010) berjudul "Forms and Strategies of Conflict Resolution in Fishing Resources Utilization in the Coastal Area of Maros District, South Sulawesi Province," menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran secara rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai strategi penyelesaian konflik, antara lain:
- 1) Peningkatan pengawasan terhadap alat penangkapan ikan berdasarkan peraturan pemerintah.
  - 2) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan lepas pantai.
  - 3) Peningkatan peran aparat penegak hukum dalam pengawasan terhadap peralatan memancing.
  - 4) Peningkatan jumlah armada kapal bermotor dengan tonase besar.
  - 5) Pengembangan teknologi penangkapan ikan berdasarkan kepentingan pemangku kepentingan.
  - 6) Penataan ruang daerah penangkapan ikan yang mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian No. 392 Tahun 1999.
  - 7) Penataan ruang daerah penangkapan ikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
  - 8) Petugas terkait yang aktif memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada nelayan.
- i. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumajanti et al. (2020) dengan judul "Strategies and Role of Local Government in Improving the

Competitiveness of Traditional Fishermen in Pandeglang, Banten" menerapkan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan penjelasan rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Urusan Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2015 mengenai Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Petambak Ikan Kecil. Agenda Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional dan memanfaatkan potensi mereka melalui kolaborasi kelompok, yang diberikan kepada dinas perikanan provinsi dan kabupaten. Dinas Perikanan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, koperasi nelayan dengan status hukum. Selain itu, upaya dilakukan dalam bentuk sosialisasi terkait penggunaan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Langkah ini menjadi krusial karena masih terdapat banyak yang menggunakan Cantrang, suatu alat penangkapan ikan yang dapat membahayakan kelestarian ekosistem laut.

- j. Penelitian yang dilakukan oleh Sulfati, A., et. al (2018) dengan judul "Empowerment of Fishing Communities in the Management of the Results of the Sea in Indonesia" menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memberikan ulasan secara rinci. Temuan penelitian menunjukkan bahwa potensi laut memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian rakyat. Meskipun demikian, potensi tersebut belum dikelola secara profesional, hal ini disebabkan oleh belum optimalnya potensi perikanan. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan dan kebijakan pemerintah yang mendukung nelayan dianggap sebagai solusi konkret untuk menciptakan perubahan dan meningkatkan kemajuan, terutama dalam sektor pemberdayaan masyarakat di sektor perikanan pesisir.

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Strategi Pengembangan Usaha Penangkapan Tuna Skala Kecil Di Kabupaten Seram Bagian Barat	Ramla D. S dan Ruslan T, 2017	Penelitian ini menggunakan metode descriptive analysis untuk mengulas secara deskriptif	Temuan dari penelitian menyatakan bahwa potensi keuntungan dalam kegiatan penangkapan ikan tuna skala kecil di Kabupaten SBB dapat dioptimalkan melalui penerapan strategi kemitraan dan pola bagi hasil yang efektif. Untuk meningkatkan implementasi strategi kemitraan, diperlukan pendekatan yang profesional dengan perjanjian yang jelas dan mematuhi prinsip	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat poin upaya peningkatan perikanan tangkap	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan yang dilakukan melalui strategi peranan pemerintah dalam upaya meningkatkan hasil tangkap

				proporsionalitas, keadilan, keuntungan bersama, dan keberlanjutan. Penggunaan pola bagi hasil juga harus memenuhi kebutuhan kedua belah pihak dengan seimbang.		
2	Kajian Ekonomi Pembangunan Industri Perikanan Tuna Loin Di Kabupaten Kaur Provinsi Sumatera Selatan	Zamdial <i>et. al.</i> , 2021	Penelitian ini menggunakan metode descriptive analysis untuk mengulas secara deskriptif	Dari hasil penelitian terungkap bahwa investasi dalam industri Perikanan Tuna Loin di Desa Pasar Lama, Kabupaten Kaur, Provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan nilai kriteria yang positif. Sebagai contoh, Net B/C ratio sebesar 1,13, NPV sebesar 594.414.281, IRR mencapai 16,20, dan PP sebesar 2,9. Data ini menggambarkan bahwa, melalui analisis finansial, pengembangan Industri	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat poin tentang potensi perikanan tangkap	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui strategi peranan pemerintah dalam upaya

				Perikanan Tuna di Desa Pasar Lama, Kabupaten Kaur, Provinsi Sumatera Selatan, dapat dianggap sebagai investasi yang berpotensi memberikan keuntungan.	diperairan provinsi sumsel	meningkatkan perikanan tangkap
3	Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Perikanan Di Desa Pulau Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten	Nur, F., 2016	Penelitian ini menggunakan metode descriptive analysis untuk mengulas secara deskriptif	Penemuan dari penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan potensi perikanan di Desa Pulau Harapan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, berhasil memenuhi kebutuhan ekonomi penduduk setempat. Kesuksesan ini tercermin dalam hasil panen ikan yang terjadi secara periodik, yakni satu atau dua kali dalam	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat poin tentang upaya pemerintah dalam melakukan	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada daerah penelitian yang dilakukan di Desa Pulau Harapan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sedangkan

	Kutai Kartanegara			setahun. Keberhasilan tersebut dapat diatributkan kepada adanya kolaborasi dan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah dan komunitas lokal.	pengembangan potnesi perikanan	penelitian penulis dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan dan terfokus pada peningkatan potensi penangkapan ikan.
4	Strategi Dinas Perikanan Dalam Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap di Kecamatan Wanasalam	Sierfi Rahayu, 2017	Penelitian ini menggunakan metode descriptive analysis untuk mengulas secara deskriptif	Temuan dari penelitian menegaskan bahwa optimalisasi potensi perikanan tangkap saat ini belum mencapai tingkat yang diinginkan, dan pendekatan strategis yang paling efektif untuk mendorong perkembangan sektor ini adalah melalui sinergi yang erat antara pemerintah, nelayan, investor, dan lembaga perbankan. Upaya ini melibatkan	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat poin tentang strategi pemerintah	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada daerah penelitian yang dilakukan di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak,

	Kabupaten Lebak			optimalisasi kerja sama dengan investor dan lembaga keuangan, penetapan regulasi yang tegas untuk nelayan yang baru datang dan sektor industri, serta penyelenggaraan beragam kegiatan yang memberikan manfaat signifikan bagi para nelayan.	dalam melakukan pengembangan potensi perikanan tangkap	Sedangkan penelitian penulis dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan dan terfokus pada peningkatan potensi penangkapan ikan.
5	Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mempertahankan Sumber Daya Perikanan Tangkap Di Sungai	Salawaty, D ., <i>et. al.</i> , 2020	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode <i>descriptive analysis</i> untuk mengulas secara deskriptif	Temuan dari penelitian ini menyiratkan bahwa inisiatif pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap telah berhasil hingga tingkat yang memadai melalui berbagai program. Langkah-langkah tersebut meliputi kegiatan seperti penyebaran benih ikan	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat poin tentang strategi	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada daerah penelitian yang dilakukan di Sungai Rungan Kota Palangka

	Rungan Kota Palangka Raya Kalimantan			<p>(restocking) di sungai dan danau di Kota Palangka Raya, penanganan illegal fishing dengan mengatur alat tangkap ikan, pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Ikan di perairan Kota Palangka Raya, serta memberikan sanksi berupa pembinaan kepada masyarakat nelayan yang terlibat dalam illegal fishing. Selain itu, fokus pemerintah juga tertuju pada usaha konservasi dan rehabilitasi kawasan perikanan di sungai dan danau di Kota Palangka Raya. Meski demikian, situasi saat ini menunjukkan adanya penurunan kualitas air sungai karena</p>	<p>pemerintah dalam fokus potensi perikanan tangkap</p>	<p>Raya, Kalimantan Tengah, Sedangkan penelitian penulis dilakukan di perairan Provinsi Sumatera Selatan dan terfokus pada peningkatan potensi penangkapan ikan.</p>
--	--------------------------------------	--	--	---	---	--

				dampak limbah perkebunan, praktik illegal fishing dengan menggunakan racun, tuba, dan alat setrum, serta aktivitas tambang emas dan pasir ilegal. Produksi perikanan tangkap di Kota Palangka Raya terus mengalami penurunan setiap tahunnya akibat degradasi lingkungan di sungai dan danau. Walaupun demikian, konsumsi ikan oleh masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun.		
6	SWOT Analysis Potensial Strategi Pengembangan Bisnis pada Cluster Sektor	R, A., Norromodani, 2017	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode <i>descriptive</i>	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Cluster A, yang terdiri dari Banyuwangi, Lamongan, dan Sumenep, disarankan untuk mengembangkan strategi bisnis dengan menggunakan	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada fokus

	Perikanan Laut Kabupaten/ Kota di Jawa Timur		<i>analysis</i> untuk mengulas secara deskriptif	pendekatan W-T Strategy. Dalam formulasi strategi ini, fokusnya adalah meminimalkan kelemahan agar dapat menghindari potensi ancaman. Cluster B, yang melibatkan Gresik, Pamekasan, dan Mojokerto, diusulkan untuk mengadopsi strategi bisnis dengan pendekatan W-O strategy, di mana upayanya difokuskan pada pengurangan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Cluster C, yang mencakup Pacitan, Trenggalek, Malang, Jember, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, dan Sampang, disarankan untuk mengembangkan strategi bisnis	sama-sama mengangkat poin pengembangan perikanan tangkap di Indonesia	penelitian yang dilakukan adalah mendeskripsikan Pengembangan bisnis sedangkan penelitian penulis terfokus pada strategi pemerintah dalam upaya peningkatan hasil perikanan tangkap.
--	--	--	--	--	---	--

				<p>dengan menggunakan pendekatan S-O strategy. Artinya, mereka dimotivasi untuk memanfaatkan kekuatan internal guna merebut peluang eksternal yang muncul. Sementara itu, Cluster D, yang mencakup Kabupaten/Kota Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Kediri, Lumajang, Bondowoso, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, dan Batu, direkomendasikan untuk mengembangkan strategi bisnis dengan pendekatan S-T strategy. Dalam formulasi strategi ini,</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				fokusnya adalah memanfaatkan semua kekuatan internal untuk mengatasi potensi ancaman eksternal.		
7	<i>Factors Influencing Successful Fishing of Tuna Free-Swimming Schools in the Equatorial Western Pacific Ocean</i>	Dai, L., et. al., 2019	Penelitian ini dilakukan dengan menentukan faktor potensial mana yang memiliki dampak signifikan terhadap hasil penangkapan ikan menggunakan data yang dikumpulkan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dalam kegiatan penangkapan ikan sangat tergantung pada sejumlah faktor kunci, seperti rata-rata kecepatan tenggelamnya alat tangkap, kondisi cahaya pada siang hari, dan kecepatan arus di lapisan dalam perairan. Tingkat keberhasilan penangkapan dapat ditingkatkan dengan kecepatan tenggelam yang tinggi, mengurangi kemungkinan ikan melarikan diri di bawah jaring	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat poin tentang perikanan tangkap	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada daerah penelitian yang berbeda dengan fokus metode penangkapan yang digunakan, Sedangkan penelitian penulis dilakukan di Provinsi Sumatera

			<p>oleh pengamat di Samudera Pasifik bagian barat khatulistiwa.</p>	<p>yang tenggelam, sehingga meningkatkan efisiensi penangkapan. Selain itu, periode intensitas cahaya rendah, seperti pada saat senja, cenderung memiliki tingkat keberhasilan penangkapan yang lebih tinggi. Kecepatan tenggelam net juga dipengaruhi oleh kecepatan arus di lapisan dalam, yang berkorelasi dengan tingkat keberhasilan yang lebih rendah. Faktor-faktor ini, bersama dengan dampak relatifnya, dicatat untuk membantu nelayan meningkatkan efektivitas upaya penangkapan mereka. Diharapkan bahwa hal ini dapat mengalihkan perhatian nelayan dari alat tangkap terkait</p>		<p>Selatan dan terfokus pada strategi pemerintah dalam upaya peningkatan hasil perikanan tangkap.</p>
--	--	--	---	--	--	---

				ke alat tangkap yang tidak terkait, sehingga berkontribusi pada pemanfaatan yang berkelanjutan dan konservasi stok tuna di Samudera Pasifik bagian barat khatulistiwa.		
8	<i>Forms and strategies of conflict resolution in fishing resources utilization in the coastal area of Maros District, South</i>	Lukman <i>et. al.</i> , 2010	Penelitian ini menggunakan metode descriptive analysis untuk mengulas secara deskriptif	Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi penyelesaian konflik dalam konteks penangkapan ikan. Strategi tersebut mencakup 1) peningkatan pengawasan alat penangkapan ikan sesuai dengan regulasi pemerintah; 2) optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan lepas pantai; 3) peningkatan peran aparat penegak hukum dalam	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat poin tentang penangkapan ikan	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yang dilakukan adalah fokus pada konflik penangkapan ikan, Sedangkan penelitian penulis terfokus pada

	<i>Sulawesi Province</i>			<p>pengawasan peralatan memancing; 4) peningkatan jumlah armada kapal bermotor dengan tonase besar; 5) pengembangan teknologi penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan; 6) penataan ruang daerah penangkapan ikan mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian No. 392 Tahun 1999; 7) penataan ruang daerah penangkapan ikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait; dan 8) peran aktif petugas terkait dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada nelayan.</p>		<p>strategi pemerintah dalam upaya peningkatan hasil penangkapan ikan.</p>
--	------------------------------	--	--	--	--	--

9	<i>Strategies And Role Of Local Government Inimprovingthe Competitiveness Of Traditional Fishermeninpendeglang, Banten</i>	Kusumajanti <i>et. al., 2020</i>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan <i>descriptive analysis</i> untuk mengulas secara deskriptif	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Urusan Kelautan dan Perikanan, telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Petambak Ikan Kecil. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional dan mengoptimalkan potensi mereka melalui kolaborasi berkelompok, yang selanjutnya didelegasikan kepada dinas perikanan provinsi dan kabupaten. Dinas Perikanan secara aktif merancang strategi	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat poin tentang potensi penangkapan ikan	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yang dilakukan adalah pemberdayaan nelayan tradisional, Sedangkan penelitian penulis terfokus pada strategi pemerintah dalam upaya peningkatan hasil perikanan tangkap.
---	--	----------------------------------	--	---	---	--

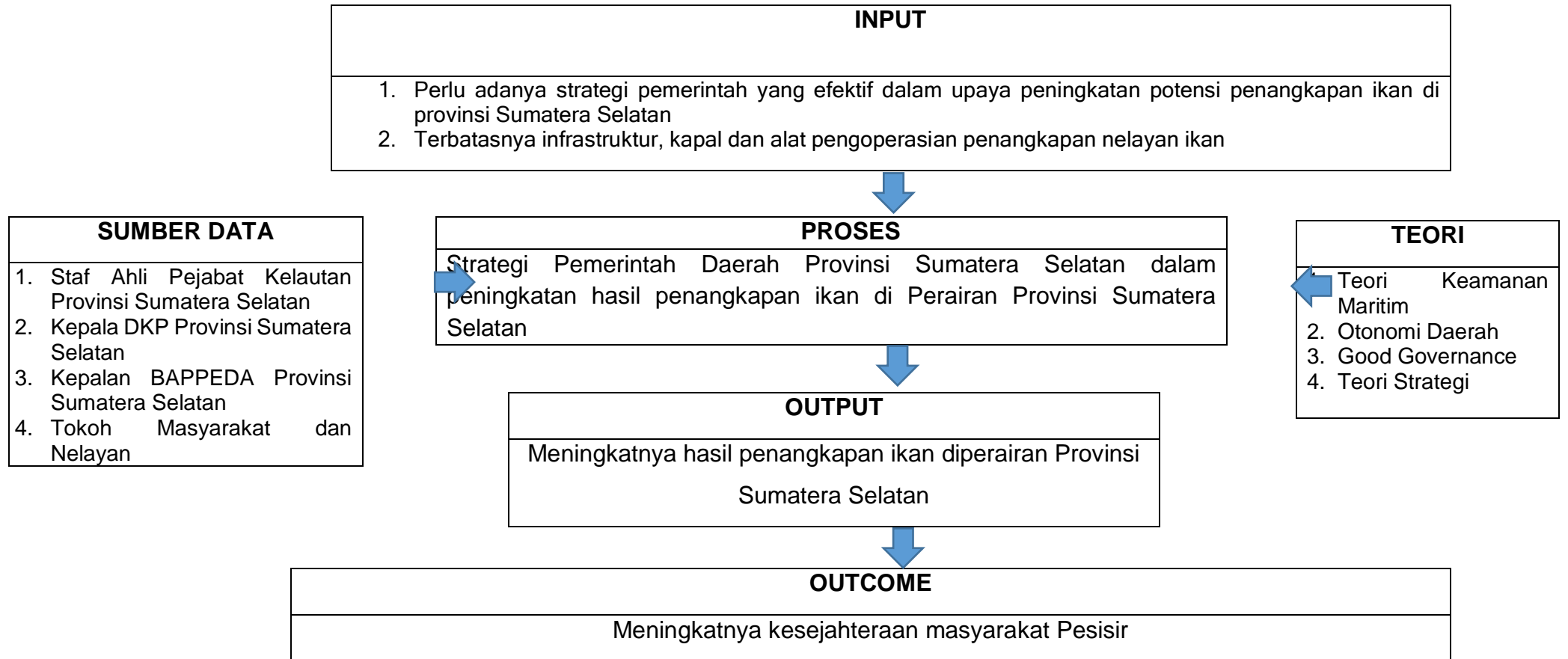
				<p>untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, termasuk mendukung pembentukan koperasi nelayan yang memiliki status hukum. Selain itu, dilakukan sosialisasi terkait penggunaan alat penangkapan ikan. Hal ini menjadi sangat penting karena masih banyak nelayan tradisional di Pandeglang yang menggunakan Cantrang, suatu alat penangkapan ikan yang dapat membahayakan keberlanjutan ekosistem laut.</p>		
10	<i>Empowerment of Fishing Communities in the</i>	Sulfati, A., et al., 2018	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan	Temuan dari penelitian menyoroti pentingnya potensi laut sebagai penopang perekonomian masyarakat. Walaupun potensi ini	Persamaan penelitian sebelumnya dengan	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian

	<i>Management of the Results of the Sea in Indonesia</i>		<i>descriptive analysis</i> untuk mengulas secara deskriptif	memiliki dampak positif, pengelolaannya belum mencapai tingkat profesionalisme yang optimal. Kurangnya optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut. Oleh karena itu, implementasi konsep pemberdayaan dan dukungan kebijakan pemerintah terhadap nelayan dianggap sebagai solusi nyata dalam mencapai perubahan dan peningkatan kemajuan, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat pada sektor perikanan pesisir.	penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat poin tentang pengelolaan potensi sumberdaya perikanan yang belum optimal	penulis terletak pada fokus penelitian yang dilakukan adalah mengangkat mengenai potensi perikanan secara menyeluruh, Sedangkan penelitian penulis terfokus pada penangkapan ikan tuna.
--	--	--	--	--	---	---

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah modal konseptual tentang bagaimana suatu teori atau konsep dalam landasan berpikir dapat berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai fokus penelitian untuk menjadi pemahaman yang mendasari alur pembahasan dan kesimpulan.

Kerangka berpikir pada penelitian dimulai dari input yang terdiri dari permasalahan yang diangkat dengan pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan proses kerangka berpikir yang terdiri dari subjek, objek dan metode serta teori maupun konsep penelitian, sehingga output dan impact yang diharapkan tidak keluar dari tujuan dan manfaat penelitian. Kerangka Penelitian dapat dilihat pada gambar 2.3.



**Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian**

Sumber : Diolah oleh peneliti (2023)